

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Anggun Puspita Sari¹ Nor Fadlilah² Joni Hendra K³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3}

Email: puspitaanggun59@gmail.com¹ norfa263@gmail.com² joniqizel77@gmail.com³

Abstract

Fiscal policy is one of the main instruments used by the government to manage the economy. This article aims to analyze the impact of fiscal policy on the Indonesian economy, with a focus on economic growth, price stability, and income distribution. The research method used is a literature study by collecting secondary data from various sources such as journals, books, scientific articles, and official reports. The results of the study indicate that fiscal policy has a significant impact on economic growth, where taxes, goods spending, and subsidies have a positive correlation, while foreign debt and employee spending have a negative correlation. In addition, fiscal policy also plays a role in controlling inflation and maintaining price stability through regulating state spending and revenues. Income distribution and improving public welfare are also important focuses of fiscal policy. This study provides comprehensive insight into the role of fiscal policy in the Indonesian economy and provides policy recommendations that can be implemented to achieve the desired economic goals.

Keywords: Impact of Fiscal Policy, Inequality Income

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pajak, belanja barang, dan subsidi memiliki korelasi positif, sementara utang luar negeri dan belanja pegawai memiliki korelasi negatif. Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan belanja dan penerimaan negara. Distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus penting dari kebijakan fiskal. Penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan Fiskal, Ketimpangan Pendapatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu berkurangnya kesenjangan intra dan antar negara (Bappenas, 2024). Koefisien gini sendiri merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan menghitung ketimpangan atau distribusi pendapatan di suatu wilayah. Distribusi pendapatan dikatakan merata jika angka koefisien gini mendekati nol Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang fokus dalam menjalankan Pembangunan ekonomi berkelanjutan menghadapi tantangan yang signifikan terkait ketimpangan pendapatan. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi angka ketimpangan pendapatan masih saja berfluktuasi perubahannya. Salah satu Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui

melalui APBN. APBN merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur penerimaan (berupa pajak) dan pengeluaran sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional dan distribusi pendapatan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan “stabilitas atau pembangunan”.

Komposisi kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran pemerintah menentukan dampak kebijakan terhadap ketimpangan pendapatan Masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, dapat mengurangi ketimpangan dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sebaliknya, pengeluaran yang lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor yang menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi dapat memperbesar ketimpangan, berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan. Namun di sisi lain, meskipun pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat sudah dibagi secara merata, akan tetapi masih saja terdapat daerah yang terbelakang baik secara ekonomi dan maupun pembangunannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danawati dkk (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka ketimpangan distribusi pendapatan juga akan semakin meningkat. Pendapatan asli daerah (PAD) juga berhubungan positif dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pengeluaran pemerintah pengaruhnya bisa meningkatkan ketimpangan ataupun mengurangi ketimpangan tergantung dari peruntukkan dari pengeluaran tersebut, seperti pajak daerah yang mempunyai hubungan negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan artinya pajak daerah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan, dikarenakan setelah melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya ternyata pengaruh kebijakan fiskal masih belum konsisten, dampaknya bisa berpengaruh positif atau negative, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. Adapun variabel kebijakan fiskal yang digunakan pada variabel ini yaitu belanja Pendidikan, pajak daerah, dan bantuan social. Menurut penelitian Apriyesa dan Miyasto (2013) pajak daerah mampu mengurangi Tingkat ketimpangan pendapatan. Modal social seperti Pendidikan dan Kesehatan juga digunakan sebagai pendukung tingkat pendapatan yang diterima, karena rendahnya modal social bisa saja menjadi pemicu timbulnya masalah kesenjangan pendapatan akibat produktifitas yang rendah. Pengeluaran pemerintah berupa bantuan social juga diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menggerakkan aktifitas ekonomi serta mencegah terjadinya resiko social, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 Tahun 2019.

Rumusan Masalah

1. Apa yang Dimaksud Dengan Kebijakan Fiskal?
2. Apa yang Dimaksud Dengan Ketimpangan Pendapatan?
3. Bagaimana Pengukuran Ketimpangan Pendapatan?
4. Bagaimana Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan tujuan memperdalam analisis tentang Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan kajian literatur yang komprehensif, mencakup penelaahan dari

berbagai penelitian terdahulu serta referensi buku-buku yang relevan dengan topik inflasi dan pengangguran di negara berkembang. Analisis akan difokuskan pada interpretasi serta pandangan para ahli dari berbagai sumber, seperti buku-buku ekonomi, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Peneliti juga akan mempertimbangkan pandangan-pandangan terbaru dari pakar ekonomi yang memiliki relevansi dengan kondisi Pendapatan saat ini, sehingga hasil analisis dapat mencerminkan kondisi aktual dan relevan dengan konteks penelitian. Dengan mengumpulkan dan membandingkan berbagai perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan landasan teoretis yang kokoh sebagai dasar argumentasi dan perumusan kesimpulan. Fokus pada sintesis dari sumber-sumber pustaka yang beragam juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kebijakan terhadap pendapatan saat ini. Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber dengan cermat sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan, berlandaskan pada teori ekonomi, dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kebijakan dalam menghadapi ketimpangan pendapatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui pengaturan pengeluaran negara dan penerimaan negara, terutama melalui sistem perpajakan. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong konsumsi, investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi atau defisit anggaran yang besar. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan fiskal melibatkan langkah-langkah seperti pengeluaran pemerintah, pemberian insentif pajak, dan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan efek positif di berbagai sektor penting dalam perekonomian. Dalam menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan beberapa instrumen yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara. Salah satu instrumen utama adalah pengeluaran untuk belanja publik, yang mencakup pengalokasian dana untuk berbagai sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program bantuan sosial. Pengeluaran ini berfungsi untuk merangsang permintaan domestik, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang lebih merata. Selain pengeluaran publik, pemerintah juga memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak bagi perusahaan atau individu, guna mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Insentif pajak ini bertujuan untuk merangsang kegiatan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konsumsi domestik.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi untuk sektor-sektor yang membutuhkan dukungan lebih. Stimulus ini bisa berupa bantuan langsung tunai, subsidi, atau program bantuan lainnya yang ditujukan untuk mendukung sektor-sektor tertentu seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup sektor-sektor tersebut dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada usaha lokal. Pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada, dengan tujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara lebih adil dan efisien. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu

serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, yang mampu mendukung perekonomian secara keseluruhan.¹ Dalam sistem ekonomi, kebijakan fiskal diterapkan melalui dua instrumen utama: pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pemerintah menggunakan pengeluaran publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, perpajakan menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas makro ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Dalam sistem ini, pajak dikenakan secara luas pada semua warga negara tanpa memperhatikan status keagamaan atau moralitas. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan diharapkan dapat mencapai redistribusi pendapatan melalui sistem pajak progresi.²

Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal. Ketimpangan pendapatan muncul pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, distribusi pendapatan akan memburuk, tetapi tahap selanjutnya akan meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Simon Kuznets berpendapat bahwa distribusi pendapatan cenderung menjadi lebih buruk, atau tidak merata pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, tetapi membaik pada tahap selanjutnya. Pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses penurunan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, pada saat terjadinya pembangunan yang lebih meningkat garis ketimpangan berbalik menuju tingkat ekuitas yang lebih tinggi dalam pembagian pendapatan.³

Dalam teori Kuznet bahwa ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu, distribusi pendapatan akan memburuk, namun, kemudian distribusi pendapatan akan meningkat dan ketidaksetaraan akan menurun, sehingga menciptakan masyarakat yang semakin adil. Singkatnya, analisis Kuznets ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan baru akan berkurang ketika kemakmuran tercapai. Dan berdasarkan analisis itu, ia juga menciptakan kurva "U Reverse" atau "U-terbalik". Hipotesis U terbalik tentang ketimpangan, hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk/tidak merata, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik/semakin merata. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang kesempatan dan peluang pembangunan yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik, sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.⁴ Penyebab kurva Environmental Kuznet antara lain:

¹ Kebijakan Moneter and Stabilitas Ekonomi, 'Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga', 7.1 (2025), pp. 141-50.

² Ihda Aini, 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.2 (2021), pp. 128-36, doi:10.32694/qst.v17i2.798.

³ Bakhtiar Al and Yunussy Subrata, 'Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur', 2018, pp. 1-13.

⁴ Muhammad Farhan and Sugianto Sugianto, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.4 (2022), pp. 243-58, doi:10.54443/sibatik.v1i4.29.

1. Bukti empiris penurunan tingkat polusi dengan pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan cadangan dengan pertumbuhan
3. Fokus pada standar hidup sebagai lawan dari PDB
4. Teknologi yang ditingkatkan dan energy terbarukan
5. De-industralisasi
6. Peran peraturan pemerintah
7. Utilitas marjinalpendapatan yang semakin berkurang

Simon Kuznet telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita. Hal ini diwakili oleh kurva U terbalik. Kuznet menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat pada awal proses pembangunan melalui adanya urbanisasi dan industrialisasi, tetapi kemudian menurun pada akhir tingkat pembangunan atau proses pembangunan yang lebih tinggi, yaitu ketika sektor industry di perkotaan mampu untuk menyerap para tenaga kerja yang terdapat di pedesaan atau sektor pertanian. Dengan adanya migrasi yang dilakukan penduduk desa ke kota maka akan membuat populasi pedesaan berkurang atau menurun dan akan mengakibatkan meningkatnya kesenjangan pendapatan antara desa dan kota dengan meningkatnya populasi perkotaan, namun berdasarkan teori Kuznet kesenjangan tersebut akan menurun seiring dengan tercapainya industrialisasi. Pertumbuhan awal seperti dijelaskan dalam model Lewis, dimana pertumbuhan yang terjadi di awal pembangunan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun pada suatu titik tertentu pertumbuhan yang terjadi akan mengurangi tingkat rasio.⁵

Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

1. Koefisien Gini (Gini Rasio). Rasio Indeks Gini adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu daerah. Indeks gini dikembangkan oleh seseorang ilmuwan Italia bernama Corrado Gini. Karya ini dipublikasikan tahun 1912 dengan judul "Variabilita e mutabilita". Menurut Todaro dan Smith, koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan daerah secara keseluruhan. Koefisien gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Penghitungan indeks gini dapat dihitung melalui cara berikut:

$$GR = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

Fi : Total kumulatif pemeroleh pendapatan dalam golongan ke-i

Yi : Total kumulatif pemeroleh pendapatan dalam golongan ke-i

Indeks gini merupakan suatu pengukuran ketimpangan yang paling banyak digunakan. Nilai indeks gini berada diantara angka 0 sampai 1. Apabila indeks gini semakin mendekati 0 maka berarti masyarakat di daerah tersebut memiliki pendapatan dengan jumlah yang sama atau rata. Namun jika indeks gini yang menunjukkan nilai semakin mendekati 1 maka menunjukkan adanya ketimpangan di suatu wilayah tersebut, yang berarti tidak merata dan hanya satu orang atau golongan kelompok masyarakat saja yang menerima pendapatan tersebut.

2. Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar golongan-golongan penduduk dengan bagian dari pendapatan yang diterimanya. Kurva Lorenz digunakan untuk menganalisis data pendapatan individu di suatu wilayah. Kurva Lorenz juga

⁵ Aris Soelistyo, *Macroeconomic Model: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroeconomic Di Indonesia*, Edisi Pertama (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

dapat dijadikan patokan untuk menentukan sebuah distribusi pendapatan sudah merata atau terjadi ketimpangan. Unsur dari kurva Lorenz adlah sumbu horizontal/mendatar yang menejlaskan presentase penduduk secara komulatif. Sedangkan sumbu vertical/ tegak merupakan presentase pendapatan yang diterima oelh penduduk. Lengkungan daerah A menunjukkan pemerataan pendapatan. Semakin luas daerah arsiran A pendapatan penduduk semakin tidak merata dan sebaliknya.⁶

Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan

Hasil analisis regresi menunjukkan variable independent yang meliputi belanja pendidikan, belanja social dan pajak daerah dapat memberikan penjelasan terhadap variable dependen yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 88,35 %. Persentase tersebut diperoleh dari nilai R squared sebesar 0.883561. Berikut table hasil analisis regresinya.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi

| Variabel | Coefficient | Prob |
|--------------------|-------------|----------|
| C | 43.67940 | 0.0000 |
| BelPend | 5.09E-06 | 0.7807 |
| BelBansos | -0.000176 | 0.0378 |
| PajDaer | -2.15E-05 | 0.0419 |
| Prob-F (Statistic) | | 0.000431 |
| R-squared | | 0.883561 |
| Adjust R-squared | | 0.839897 |

Sumber:data diolah melalui E-Views, 2024

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1 menunjukan bahwa variabel belanja pendidikan memilikihubungan positif namun tidak signifikan sedangkan variabel belanja bantuan sosial dan variabel pajak daerah memilikihubungan negative dan berpengaruh signifikan terhadap variabel gini ratio (Y). berdasarkan persamaan sebelumnya maka didapat: $Y = 43.67940 + 5.09E-06X_1 - 0.000176X_2 - 2.15E-05X_3 + e$ Melalui hasil regresi dan persamaan tersebut diatas dapat diartikan bahwa belanja Pendidikan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zufri (2013) yang menjelaskan bahwa belanja Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM), penelitian Haryadi (2011) juga menjelaskan bahwa belanja Pendidikan di kab/kota dengan variabel input belanja pendidikan serta variabel output berupa APM, rasio guru-murid, rasio kelas –murid, angka putus sekolah, dan angka melanjutkan.⁷ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan belanja Pendidikan tidak menjamin terjadinya peningkatan pada sektor Pendidikan karena Sebagian daerah masih mengalami inefisiensi. Akibatnya, Ketika sektor Pendidikan tidak berkembang maka kualitas Sumber daya manusia nya pun tidak mengalami peningkatan, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Variabel belanja bantuan social berpengaruh negative dan signifikan terhadap koefisien gini, berdasarkan persamaan diatas dapat kita simpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan pada belanja bantuan social sebesar 1 persen (ceteris paribus) maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan menurun sebesar 0.000176. Hal ini sesuai dengan peran distribusi pemerintah dimana pemerintah berperan sebagai pihak yang melakukan distribusi atau pemerataan pendapatan atau kekayaan kepada Masyarakat. Kegiatan pemerintah dalam menyalurkan belanja modal dan bantuan sosial, salah satunya merupakan bentuk pemerintah

⁶ Neva Rodiyatul Sholikah and Niniek Imaningsih, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10.3 (2022), pp. 247–53, doi:10.26740/jupe.v10n3.p247-253.

⁷ Ketimpangan Pendapatan and others, 'Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', 18.1 (2024), pp. 296–300.

dalam menerapkan fungsi alokasi dan distribusi. Variable pajak daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap koefisien gini, berdasarkan persamaan diatas dapat kita simpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 1% (ceteris paribus) maka angka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,0000215. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyesa dan Miyasto (2013) bahwa pajak daerah mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen utama dalam mengelola perekonomian yang memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal, melalui pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara, berperan dalam mendukung sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan UMKM. Sementara itu, kebijakan moneter, melalui pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, berfokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan likuiditas sistem keuangan. Koordinasi yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing, kedua kebijakan ini dapat menciptakan sinergi yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kestabilan makroekonomi nasional. Pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Dari sini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan perlu ditumbuhkan, karena pendidikan itu sendiri merupakan human capital investment sehingga kualitas SDM semakin baik. Selain menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari berbagai sector seperti pendidikan, Kesehatan, pendapatan per kapita, disisi lain juga harus ada pengawasan dari pemerintah pusat dan masyarakat agar terwujud IPM yang berkualitas sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihda, 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.2 (2021), pp. 128–36, doi:10.32694/qst.v17i2.798
- Al, Bakhtiar, and Yunussy Subrata, 'Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur', 2018, pp. 1–13
- Farhan, Muhammad, and Sugianto Sugianto, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa', *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.4 (2022), pp. 243–58, doi:10.54443/sibatik.v1i4.29
- Moneter, Kebijakan, and Stabilitas Ekonomi, 'Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga', 7.1 (2025), pp. 141–50
- Pendapatan, Ketimpangan, and others, 'Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', 18.1 (2024), pp. 296–300
- Sholikah, Neva Rodiyatul, and Niniek Imaningsih, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10.3 (2022), pp. 247–53, doi:10.26740/jupe.v10n3.p247-253
- Soelistyo, Aris, *Macroeconometric Model: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macprudential Di Indonesia*, Edisi Pert (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)